



PROPOSAL

**PEMBENTUKAN BADAN
RISET DAN INOVASI
DAERAH (BRIDA)
KABUPATEN
TRENGGALEK**

**DIAJUKAN KEPADA:
DEPUTI BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

**OLEH:
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2022**



BUPATI TRENGGALEK

Trenggalek, 4 Oktober 2022

Nomor : 050/ **2206** /406.026/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Pembentukan
BRIDA**

Kepada :
Yth. Kepala Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN)
di
JAKARTA

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), disampikan dengan hormat bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek berencana membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dengan proposal sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut mohon pertimbangan pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bpk. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Yth. Ibu Gubernur Jawa Timur;
3. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek.



hanya 5 Kecamatan yang mayoritas berupa dataran, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Karang, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan yang sebagian besar terletak di bagian utara dan tengah wilayah Kabupaten Trenggalek. Sedangkan 9 Kecamatan lainnya mayoritas berupa pegunungan. Kawasan pegunungan terletak pada kabupaten sebelah utara dan tengah yaitu Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak dan Kecamatan Dongko. Sedangkan Kawasan pesisir terletak di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul.

Dua kecamatan yang memiliki luas wilayah yang cukup besar bila dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya yaitu Kecamatan Munjungan dengan luas 15.480 Ha (12,27%) dan Kecamatan Watulimo dengan luas 15.444 Ha (12,24%) yang merupakan kawasan pesisir di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan kecamatan dengan ukuran luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pogalan dengan luas 4.180 Ha (3,31%). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Trenggalek

No	Nama Kecamatan	Jumlah				Luas Wilayah	
		Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Panggul	17	66	155	521	13.156	10,43
2.	Munjungan	11	44	66	356	15.480	12,27
3.	Watulimo	12	36	79	336	15.444	12,24
4.	Kampak	7	23	76	251	7.900	6,26
5.	Dongko	10	39	115	459	14.120	11,19
6.	Pule	10	34	93	379	11.812	9,36
7.	Karangan	12	32	71	296	5.092	4,04
8.	Suruh	7	27	41	189	5.072	4,02
9.	Gandusari	11	49	125	328	5.496	4,36
10.	Durenan	14	47	81	313	5.716	4,53
11.	Pogalan	10	36	121	319	4.180	3,31
12.	Trenggalek	13	33	74	244	6.116	4,85
13.	Tugu	15	45	99	324	7.472	5,92
14.	Bendungan	8	29	64	202	9.084	7,2
Jumlah		157	540	1.260	4.517	126.140	100

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2021

Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti Kabupaten-Kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 (dua) jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September-April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus. Namun saat ini terjadi perubahan anomali cuaca, siklus hujan menjadi tidak menentu.

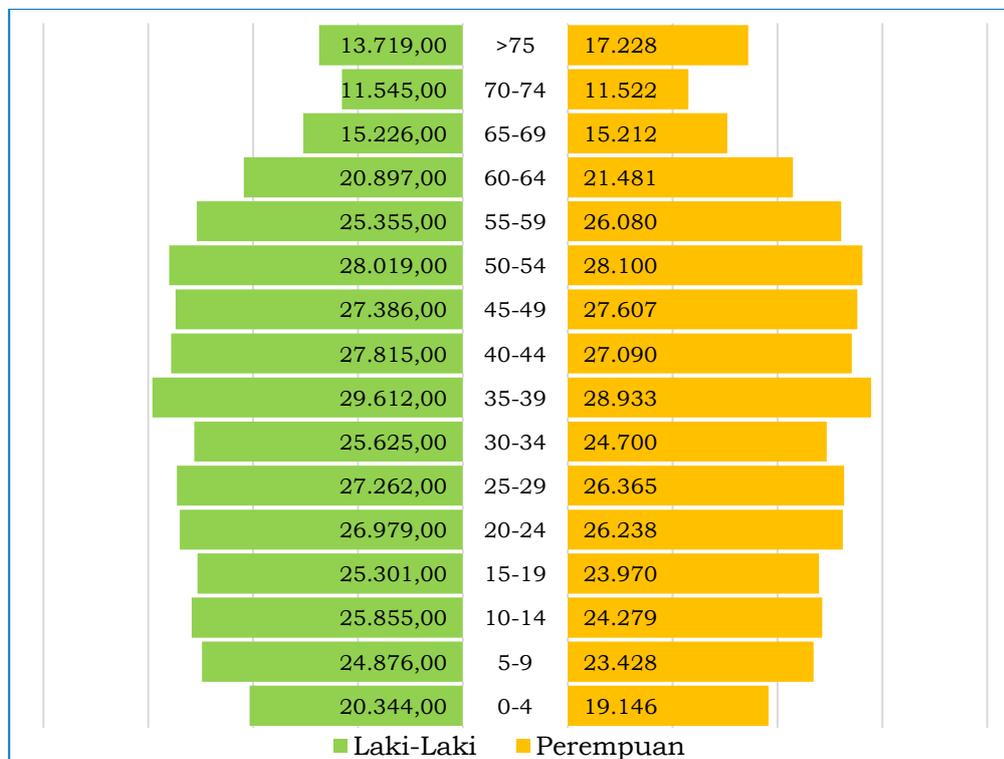
b. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 berdasarkan hasil Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan sebanyak 747.195 jiwa, dan pada tahun 2020 sebanyak 753.820 jiwa, terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 6.625 jiwa dibanding tahun 2020. Hal ini dikarenakan :

- 1) Pada tahun 2021, jumlah penduduk yang datang ke Kabupaten Trenggalek sebesar 4.655 jiwa. Hal ini lebih kecil dari pada jumlah penduduk yang pindah dari Kabupaten Trenggalek yaitu sebesar 4.802 jiwa, sehingga terdapat selisih 147 jiwa.
- 2) Jumlah kelahiran dan biodata baru tahun 2021 sebanyak 2.641 jiwa.
- 3) Jumlah Kematian tahun 2021 sebanyak 2.312 jiwa.
- 4) Selisih Jumlah Penduduk lainnya adalah data bermasalah (data anomali, data ganda dan lain sebagainya) sejumlah 6.807 jiwa.

Bila dilihat dari kelompok umur sebagaimana digambarkan pada grafik Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek tahun 2021, diketahui bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan komposisi terbanyak adalah penduduk yang berusia 35-39 tahun dengan jumlah 58.545 jiwa atau 7,81%, sedangkan komposisi terkecil adalah penduduk dengan usia 70-74 tahun yakni sejumlah 23.067 jiwa atau sebesar 3,08% dari total penduduk Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021. Dan untuk kelompok umur 5-9 tahun jenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan kelompok umur jenis kelamin perempuan.

Grafik
Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2022

Secara rinci jumlah penduduk di setiap kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini. Dari jumlah penduduk 763.690 jiwa pada tahun 2021 terdiri dari laki-laki berjumlah 382.971 jiwa atau 50,15% dan penduduk perempuan berjumlah 380.719 jiwa atau 49,85% dari total jumlah penduduk dengan rincian setiap kecamatan sebagai berikut:

Tabel
Sumber Daya Manusia Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	Laki – Laki			Perempuan			Jumlah			Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Panggul	40.614	41.197	40.681	39.778	40.314	39.861	80.392	81.511	80.542	611,07	619,57	612,21
2	Munjungan	27.250	27.611	27.371	26.195	26.720	26.483	53.445	54.331	53.854	345,25	350,98	347,89
3	Pule	28.805	29.086	28.842	28.252	28.700	28.415	57.057	57.786	57.257	483,04	489,21	484,74
4	Dongko	34.209	34.529	34.118	33.059	33.542	33.155	67.268	68.071	67.273	476,40	482,09	476,44
5	Tugu	24.496	24.525	24.299	25.121	24.944	24.850	49.617	49.469	49.149	664,04	662,06	657,78
6	Karangan	25.300	25.382	25.144	25.590	25.190	25.077	50.890	50.572	50.221	999,41	993,17	986,27
7	Kampak	19.223	19.351	19.186	18.895	19.002	18.926	38.118	38.353	38.112	482,51	485,48	482,43
8	Watulimo	36.172	36.585	36.227	34.982	35.665	35.151	71.154	72.250	71.378	460,72	467,82	462,17
9	Bendungan	13.974	14.171	14.027	13.741	14.047	13.940	27.715	28.218	27.967	305,10	310,63	307,87
10	Gandusari	27.121	26.938	26.852	27.150	26.813	26.838	54.271	53.751	53.690	987,46	978,00	976,89
11	Trenggalek	33.310	33.261	33.008	33.766	33.381	33.265	67.076	66.642	66.273	1.096,73	1.089,63	1.083,60
12	Pogalan	27.239	27.266	26.891	27.064	26.707	26.572	54.303	53.973	53.463	1.299,12	1.291,22	1.279,02
13	Durenan	26.024	26.142	25.790	26.042	25.901	25.615	52.066	52.043	51.405	910,88	910,48	899,32
14	Suruh	13.495	13.526	13.380	13.384	13.324	13.231	26.879	26.850	26.611	529,95	529,38	524,66
Jumlah		377.232	379.570	375.816	373.019	374.250	371.379	750.251	753.820	747.195	594,78	597,61	592,35

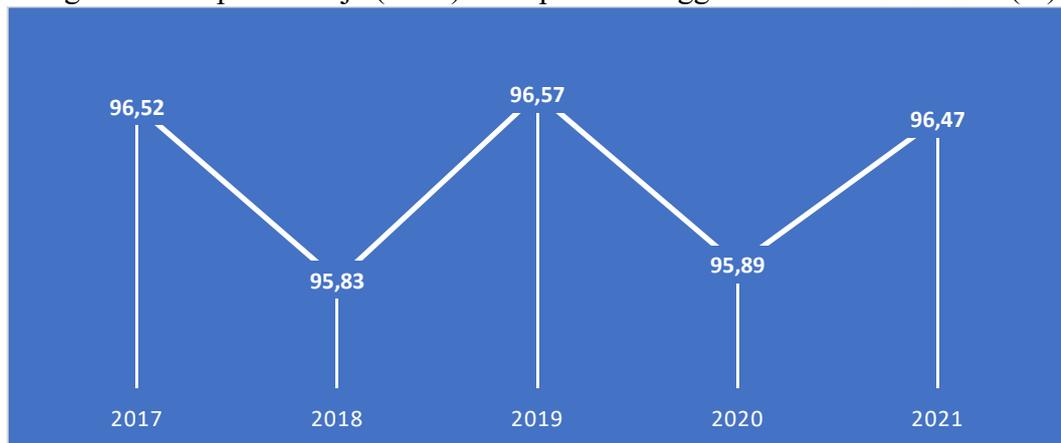
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2022

c. Ketenagakerjaan

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Informasi data ketenagakerjaan akan memberi banyak manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat Kesempatan Kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Semakin besar angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. Berikut Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dari tahun 2017-2021 :

Grafik
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2022

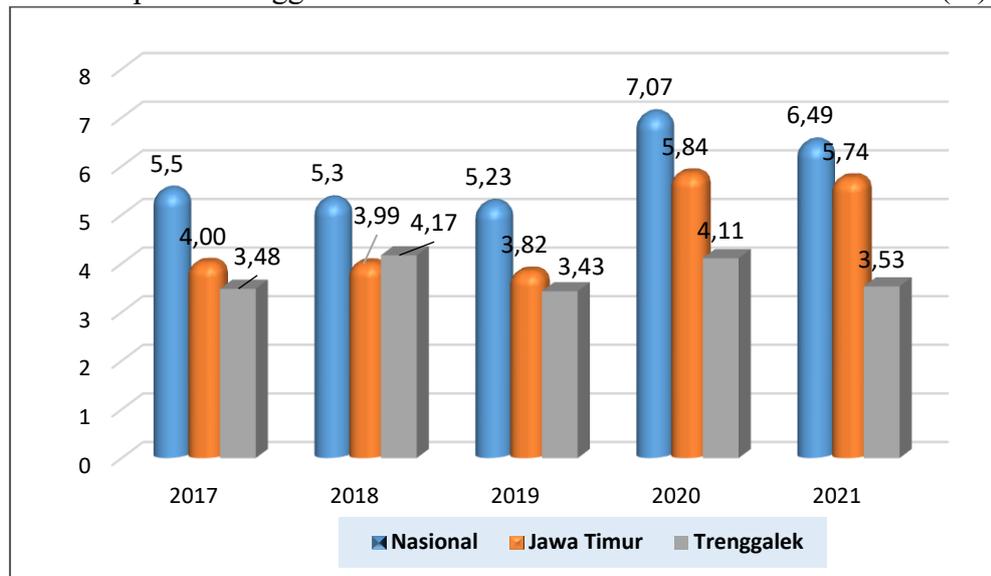
Berdasarkan grafik di atas, Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Trenggalek cenderung fluktuatif. TKK tahun 2017 sebesar 96,52% sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 95,83% dan pada tahun 2019 meningkat 0,77% dari tahun 2018 menjadi 96,57%. Adapun realisasi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2020 mencapai 95,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,75% atau tercapai sebesar 99,11% dan pada tahun 2021 terealisasi 96,47% atau tercapai sebesar 100,58% dari target 95,91%.

Indikator yang sering digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan kerjanya dibidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2021 sebesar 3,53% menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 4,11%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 4 orang yang menganggur. Sedangkan Tahun 2019 TPT Kabupaten Trenggalek sebesar 3,43% mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 yang sebesar 4,17%. Penurunan TPT tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 3 orang yang menganggur.

Nilai tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek dari tahun 2017-2021 ditunjukkan grafik berikut :

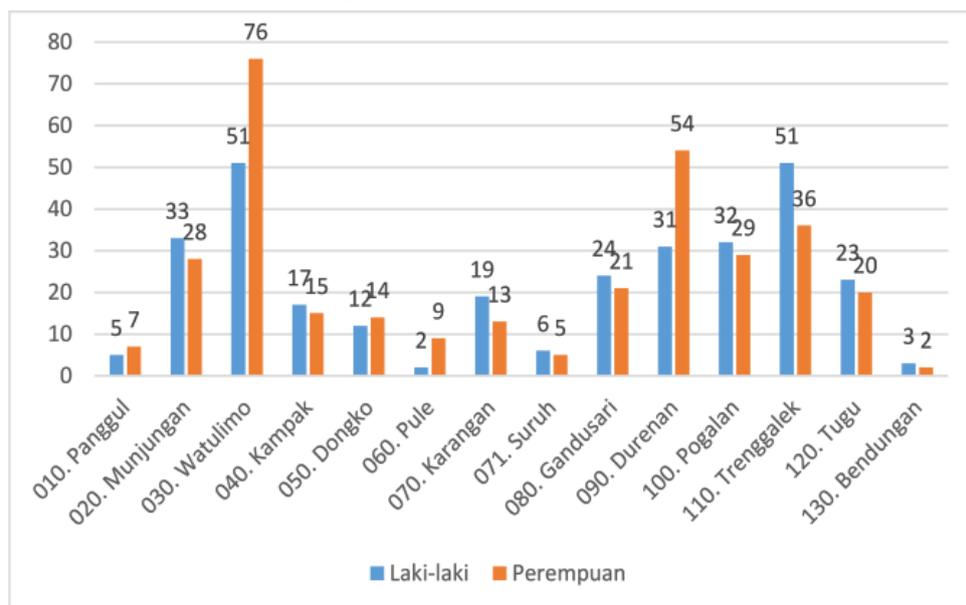
Grafik
TPT Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017–2021 (%)



Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan BPS Prov. Jawa Timur, 2022

Jumlah Pencari Kerja selama tahun 2021 sebanyak 638 orang. Pencari kerja terbanyak berasal dari kecamatan Watulimo sebesar 127 orang dan paling sedikit adalah kecamatan Bendungan yaitu 5 orang.

Grafik
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kecamatan, 2021



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2022

d. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan pembangunan Kabupaten Trenggalek dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sebagai dampak pandemi COVID-19 akan sangat berpengaruh pada tingginya kerentanan dan kerawanan sosial ekonomi keluarga, hal ini akan berakibat munculnya data-data anomali yang terjadi tahun 2020. Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan capaian indikator nilai dan kontribusi kategori dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini (Gini Ratio), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Laju Inflasi.

a. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan di suatu wilayah baik pada level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. IPEI Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 sebesar 5,29 dan menurun sebesar 0,04 di tahun 2018 menjadi 5,25. Pada tahun 2019 naik menjadi 5,44 dan tahun 2020 turun menjadi 5,40 namun meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 5,60. Dalam mengukur Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Trenggalek melibatkan 3 Pilar dan 8 Sub Pilar yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel

Data Capaian Pilar dan Sub Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sesuai Perhitungan Bappenas Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021

No	Pilar	Sub Pilar	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi		4,75	4,67	4,83	4,66	4,87
		Pertumbuhan Ekonomi	2,67	2,68	2,71	2,5	2,72
		Kesempatan Kerja	6,23	5,74	6,22	6,19	6,46
		Infrastruktur Ekonomi	6,45	6,60	6,68	6,56	6,58
2.	Indeks Pemerataan Pedapatan dan Pengurangan Kemiskinan		6,24	6,10	6,32	6,35	6,41
		Ketimpangan	4,94	4,76	4,98	5,1	5,23
		Kemiskinan	7,88	7,83	8,02	7,9	7,87
3.	Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan		5,55	5,73	6,16	6,14	6,47
		Kapabilitas Manusia	6,75	6,56	6,73	6,96	7,30
		Infrastruktur Dasar	6,62	6,80	8,18	8,51	8,33
		Keuangan Inklusif	3,82	4,22	4,25	3,91	4,45

Sumber : Bappenas RI, 2022

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional untuk kurun waktu tahun 2017–2021 sebagaimana grafik berikut ini.

Grafik
Realisasi LPE Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2022
BPS Prov. Jawa Timur, 2022

Sebagaimana disajikan grafik di atas, capaian LPE Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu tahun 2017-2019 cenderung meningkat dalam pertumbuhan positif, namun menurun di tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021. LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2017 sebesar 5,02 dan tahun 2018 meningkat menjadi 5,03. Untuk data LPE tahun 2019 meningkat 0,99% dari tahun 2018 menjadi sebesar 5,08. Sedangkan pada tahun 2020 menjadi -2,17% atau tercapai sebesar -42,14% dari target yang ditetapkan sebesar 5,15% – 5,20%. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,65% atau tercapai sebesar 84,88% dari target yang ditetapkan sebesar 4,3% - 5%.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, kontraksi pada tahun 2020 tentunya sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Ada Sembilan Lapangan Usaha yang mengalami kontraksi, kontraksi yang terbesar adalah pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 15,18 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,42 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,57 persen, Jasa Konstruksi sebesar 7,25 persen, Jasa Perusahaan 6,62 persen, Pertambangan dan Penggalian 6,16 persen, Transportasi dan Perdagangan 5,39 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,65 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,39 persen. Sedangkan delapan lapangan usaha lainnya tercatat mengalami

pertumbuhan positif. Dari delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif diatas tiga persen yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,92 persen. Diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 7,80 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,96 persen. Sedangkan empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kurang dari 3 (tiga) persen adalah lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 2,91 persen, Industri Pengolahan 2,44 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,64 dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,10 persen.

Sedangkan selama tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 3,65 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang berkontraksi 2,17 persen. Pertumbuhan ekonomi selama 2021 hampir semua kategori mengalami kenaikan kecuali kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang mengalami penurunan sebesar 0,72 persen. Enam belas kategori lainnya naik karena pandemi covid-19 mulai mereda. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 9,48 persen. Salah satu penyebabnya adalah peningkatan perputaran roda ekonomi. Berturut turut diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan 9,12 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,46 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,74 persen, Informasi dan Komunikasi 5,66 persen, Jasa lainnya 3,66 persen dan Pengadaan Listrik dan Gas 2,84 persen. Sembilan Lapangan usaha yang lainnya terbagi menjadi dua kelompok yaitu enam kategori antara 1–2,80 persen dan tiga kategori dibawah satu persen. Enam kategori tersebut yaitu Real Estat sebesar 2,80 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 2,36 persen, Jasa Perusahaan sebesar 2,28 persen, Jasa Pendidikan sebesar 1,61 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,36 persen.

c. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. PDRB merupakan jumlah seluruh nilai produksi barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikurangi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB antara lain adalah :

- 1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku secara nominal dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, demikian pula sebaliknya;
- 2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan secara riil dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Seiring dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek yang rata-rata mengalami peningkatan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada Tahun 2020 yang mengalami penurunan. Sedangkan Tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020. PDRB ADHK sudah mengeluarkan faktor inflasi sehingga merupakan angka murni yang dapat dipakai untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi.

Capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek di Tahun 2021 sebesar 12,96 triliun rupiah yang mana mengalami kenaikan dari Tahun 2020 yang sebesar 12,50 triliun rupiah. Tahun 2019 PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek mencapai 12,78 triliun rupiah. PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 17 kategori atau lapangan usaha sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan Rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.067.312,6	3.024.719,3	3.039.096,9	3.042.010,9	3.020.035,4
B	Pertambangan dan Penggalian	744.699,0	764.773,5	774.844,1	727.139,4	737.034,2
C	Industri Pengolahan	1.726.069,0	1.924.941,6	2.103.698,4	2.155.010,1	2.351.544,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.898,5	5.142,0	5.498,2	5.533,5	5.690,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.023,5	7.374,2	7.764,5	8.149,5	8.698,8
F	Konstruksi	868.507,5	930.594,4	989.897,2	918.126,0	920.363,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.968.293,3	2.095.490,2	2.219.967,2	2.010.830,9	2.160.870,7
H	Transportasi dan Pergudangan	175.129,9	191.447,4	210.415,4	199.069,0	217.938,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	221.814,3	240.296,4	258.222,9	236.081,2	241.642,2
J	Informasi dan Komunikasi	740.896,8	791.970,9	853.079,6	919.657,9	971.682,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	303.321,8	320.789,1	336.061,2	334.749,0	337.865,7
L	Real Estate	248.994,1	269.019,0	285.395,6	295.245,7	303.526,8
M,N	Jasa Perusahaan	29.197,3	31.752,2	33.976,7	31.726,5	32.451,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	499.568,4	525.618,4	546.354,2	531.895,7	532.770,4
P	Jasa Pendidikan	533.582,0	568.635,4	611.431,5	629.240,1	639.389,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106.489,3	116.200,0	127.162,7	138.509,6	146.420,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	334.060,8	353.094,2	376.588,5	319.410,4	331.093,6
	PDRB	11.579.858,1	12.161.858,1	12.779.455,0	12.502.385,0	12.959.018,5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2022

Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan potensi perekonomian suatu wilayah. Tingginya

peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong pengembangan roda perekonomian. Hal tersebut dapat diketahui diantaranya melalui membandingkan capaian PDRB atau sumbangan nilai tambah sebuah sektor pada suatu wilayah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Tahun 2021 PDRB ADHB Kabupaten Trenggalek 19,20 triliun rupiah. Tahun 2020 sebesar 18,31 triliun rupiah dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 18,55 triliun rupiah yang terbagi pada 17 kategori atau lapangan usaha sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Trenggalek Tahun
2017-2021 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.812.778,4	4.922.404,6	5.051.028,7	5.136.532,0	5.183.223,3
B	Pertambangan dan Penggalian	1.019.787,4	1.104.889,4	1.146.436,3	1.081.922,3	1.116.800,7
C	Industri Pengolahan	2.342.335,0	2.678.880,4	2.992.868,2	3.081.133,4	3.452.704,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.744,2	6.289,6	6.851,7	6.888,3	7.181,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.870,9	9.431,8	9.845,0	10.340,0	11.049,9
F	Konstruksi	1.244.584,8	1.344.709,3	1.406.591,8	1.305.160,1	1.321.956,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.504.677,3	2.774.931,2	3.007.036,5	2.745.155,7	2.980.651,2
H	Transportasi dan Pergudangan	234.635,4	262.410,8	294.478,2	278.969,9	307.396,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	316.481,7	348.913,3	383.458,2	354.862,7	381.178,7
J	Informasi dan Komunikasi	838.783,7	896.867,6	979.130,2	1.059.623,2	1.122.695,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	431.365,6	464.466,4	491.864,7	490.400,7	497.702,9
L	Real Estate	313.026,9	348.058,2	379.545,5	393.890,4	406.129,7
M,N	Jasa Perusahaan	41.169,0	46.273,1	50.737,9	47.655,7	49.444,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	679.654,6	754.722,6	838.079,2	838.051,0	836.766,5
P	Jasa Pendidikan	721.456,4	772.528,5	844.612,4	871.533,7	873.032,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	134.714,4	147.127,9	162.334,9	178.317,0	191.021,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	431.588,8	471.632,0	508.292,3	434.025,1	459.311,2
PDRB		16.081.654,5	17.354.536,7	18.553.191,7	18.314.461,3	19.198.246,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2022

Berdasarkan capaian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di atas dapat dilihat struktur ekonomi suatu daerah, dimana setiap sektor memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap PDRB. Kontribusi per sektor terhadap PDRB di Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Struktur Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021 (%)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,93	28,36	27,22	28,05	27,00
B	Pertambangan dan Penggalian	6,34	6,37	6,18	5,91	5,82
C	Industri Pengolahan	14,57	15,44	16,13	16,82	17,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06
F	Konstruksi	7,74	7,75	7,58	7,13	6,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,57	15,99	16,21	14,99	15,53
H	Transportasi dan Pergudangan	1,46	1,51	1,59	1,52	1,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,97	2,01	2,07	1,94	1,99
J	Informasi dan Komunikasi	5,22	5,17	5,28	5,79	5,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,68	2,68	2,65	2,68	2,59
L	Real Estate	1,95	2,01	2,05	2,15	2,12
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,27	0,27	0,26	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,23	4,35	4,52	4,58	4,36
P	Jasa Pendidikan	4,49	4,45	4,55	4,76	4,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	0,85	0,87	0,97	0,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,68	2,72	2,74	2,37	2,39
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017-2019 perekonomian Kabupaten Trenggalek didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada urutan pertama, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor pada urutan kedua, sedangkan urutan ketiga adalah sektor Industri Pengolahan. Sedangkan tahun 2020 dan 2021 didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada urutan pertama, sektor Industri Pengolahan pada urutan kedua, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor pada urutan ketiga.

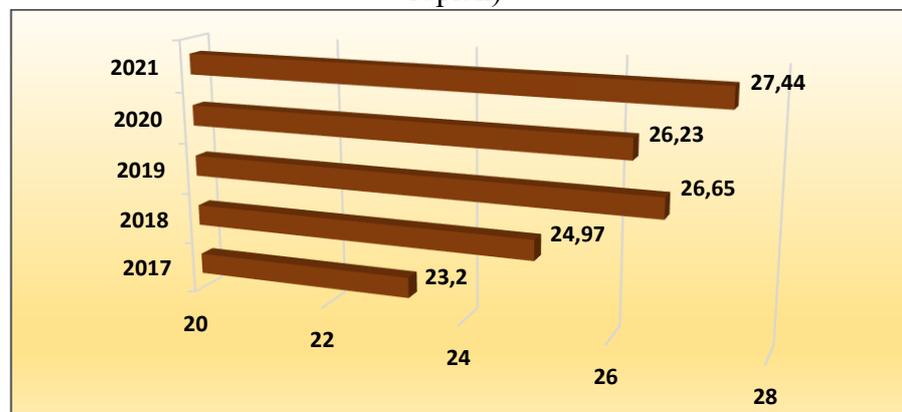
Untuk Tahun 2019, sumbangan terbesar pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,22%. Sementara lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor memberikan kontribusi sebesar 16,21% dan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 16,13%. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas memberikan kontribusi terkecil yaitu 0,04%. Sedangkan untuk Tahun 2020, dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,05%. Sementara lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 16,82% dan lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor memberikan kontribusi sebesar 14,99%. Sedangkan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas memberikan kontribusi terkecil yaitu 0,04%. Pada Tahun 2021, kontribusi terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,00%, Industri

Pengolahan sebesar 17,98% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,53%.

d. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB Perkapita didapat dari hasil penghitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Namun setidaknya PDRB perkapita dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat. PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2021 sebesar 27,44 juta naik dibandingkan Tahun 2020 yang sebesar Rp 26,23 juta. Pada Tahun 2019 mencapai Rp 26,65 juta naik dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp. 24,97 juta. Sedangkan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 23,2 Juta.

Grafik
PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2022

e. Indeks Pembangunan Manusia

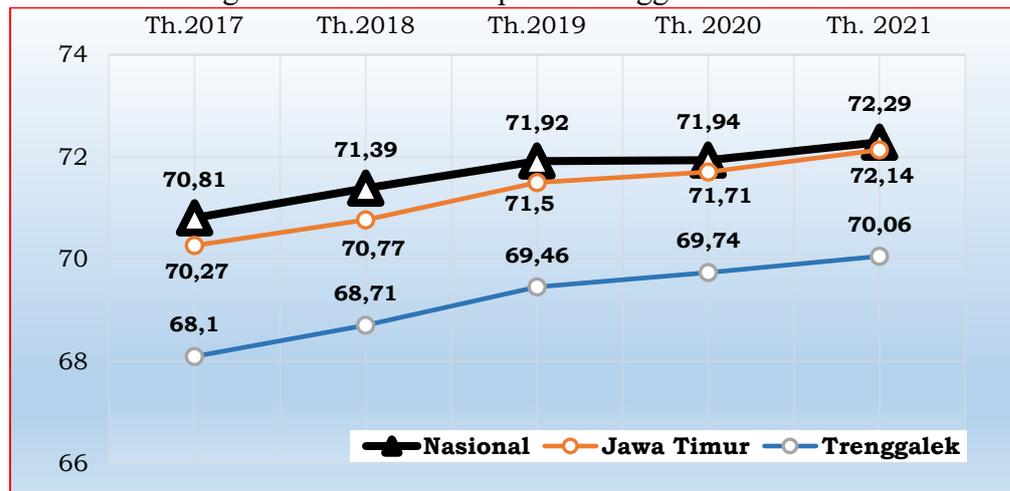
Salah satu alat ukur yang merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

Indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 komponen pilihan dasar yaitu :

1. Hidup sehat dan umur panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir;
2. Pendidikan yang diwakili oleh rata-rata tertimbang antara rata-rata harapan lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan rata-rata pencapaian tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah);
3. Standar kehidupan layak yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau Paritas Daya Beli (PPP) per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Kabupaten Trenggalek tahun 2017 mencapai 68,10 dan tahun 2018 meningkat menjadi 68,71. Sedangkan untuk IPM tahun 2019 berdasarkan hasil perhitungan BPS, meningkat kembali sebesar 1,09% dari tahun 2018 yakni menjadi 69,46 dari target 68,75-69,25 atau dengan capaian 101,03%. Pada tahun 2020, IPM kembali meningkat sebesar 0,40% dari tahun 2019 menjadi 69,74 dari target 69,25-69,75 atau dengan capaian 100,71%. Pada tahun 2021, IPM meningkat sebesar 0,46% dibandingkan tahun 2020 menjadi 70,06 atau dengan capaian 99,60%.

Grafik
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2022
 Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur, 2022
 Badan Pusat Statistik, 2022

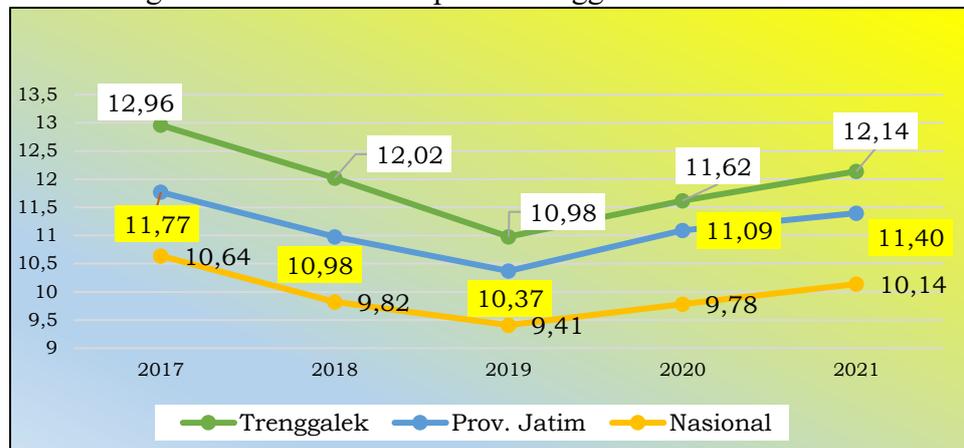
f. Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan kata lain kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan. Angka Kemiskinan merupakan Indikator Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, mendukung Tujuan ke I:

Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun. Target Nasional yang akan dicapai adalah menurunkan Angka Kemiskinan pada Tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (Angka Dasar adalah Angka Kemiskinan Tahun 2015 : sebesar 11,13%). Dalam sasaran pengurangan kemiskinan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2020-2024, target tingkat kemiskinan Kabupaten Trenggalek tahun 2021 adalah 7%-8% namun demikian berdasarkan data BPS per bulan maret 2021 capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Trenggalek masih 12,14% naik 0,31% terhadap capaian maret 2020 yang berada pada angka 11,62%. Dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek ditargetkan tingkat kemiskinan secara bertahap turun kurang lebih 1% per tahun sehingga diharapkan pada tahun 2022 menjadi 10,94%.

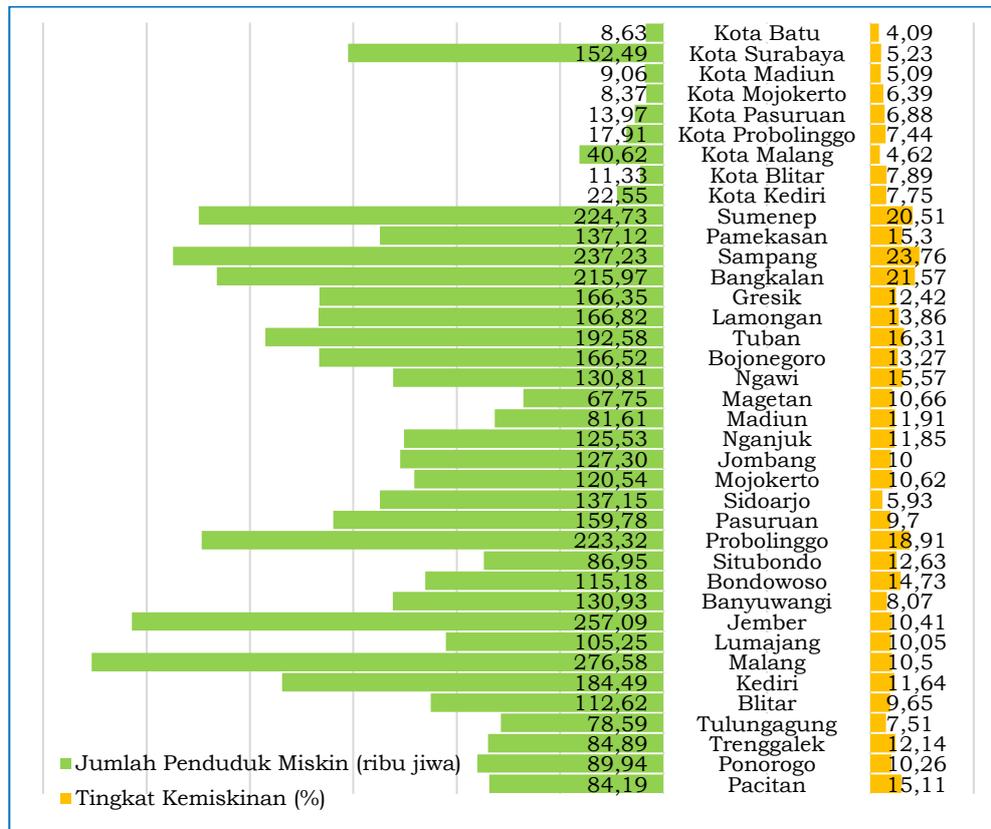
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek selama tiga tahun terakhir (2017-2019) menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 12,96%. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12,02%. Dan pada tahun 2019 kembali terjadi penurunan sebesar 8,65% dari tahun 2018 menjadi 10,98% dari target 11,50-12,00% atau tercapai 104,74%. Sedangkan tahun 2020 angka kemiskinan meningkat menjadi 11,62% atau tercapai 94,66% dari target sebesar 11,00-11,50%. Angka tersebut berada di atas angka kemiskinan Jawa Timur yang sebesar 11,09%, dan pada tahun 2021 angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 12,14% atau tercapai 91,76% dari target 11,14%.

Grafik
Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, BPS Prov. Jawa Timur, BPS Republik Indonesia, 2022, Data per Maret

Grafik
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2022

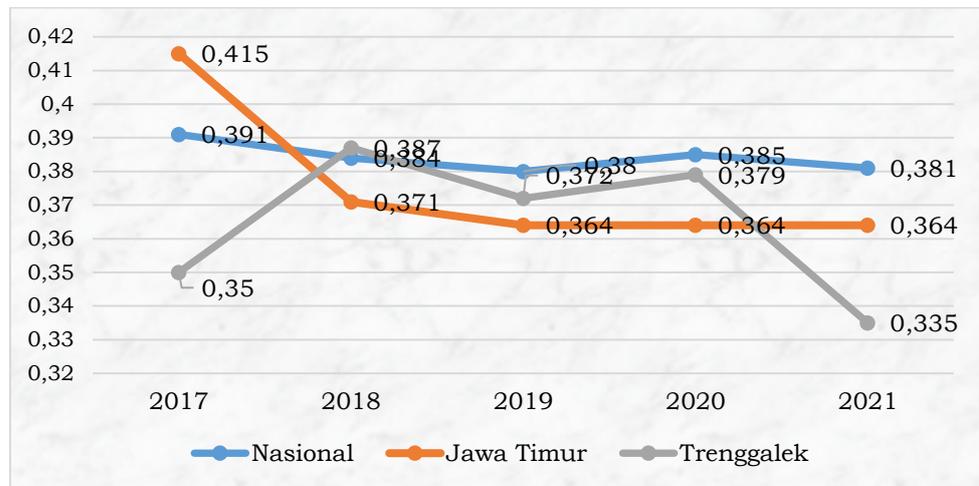
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program strategis GERTAK antara lain *Anti Poverty Program*, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Padat Karya dan berbagai program yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin. Jika dibandingkan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten/Kota lain di provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019, tingkat kemiskinannya berada pada urutan ke-15 yang paling tinggi se-Jatim. Sedangkan Tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Trenggalek berada pada urutan ke-15 yang paling tinggi dari 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur, dan pada Tahun 2021 berada pada urutan ke-14 yang paling tinggi dari 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur.

g. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini (*Gini Ratio*) digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat, yaitu mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Apabila Indeks Gini $G < 0,3$ menunjukkan ketimpangan rendah, sedangkan ketimpangan sedang $0,3 < G < 0,5$ dan untuk $G > 0,5$ menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Berikut grafik tentang perkembangan Indeks Gini Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 :

Grafik
Indeks Gini Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dan
Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan BPS Prov. Jawa Timur, 2022

Keterangan : Data per September

Indeks Gini merupakan Indikator Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, mendukung Tujuan ke 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara. Target Nasional yang akan dicapai adalah menurunkan Indeks Gini menjadi 0,36 (Angka Dasar adalah Indeks Gini Tahun 2014: sebesar 0,41). Indeks Gini Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas.

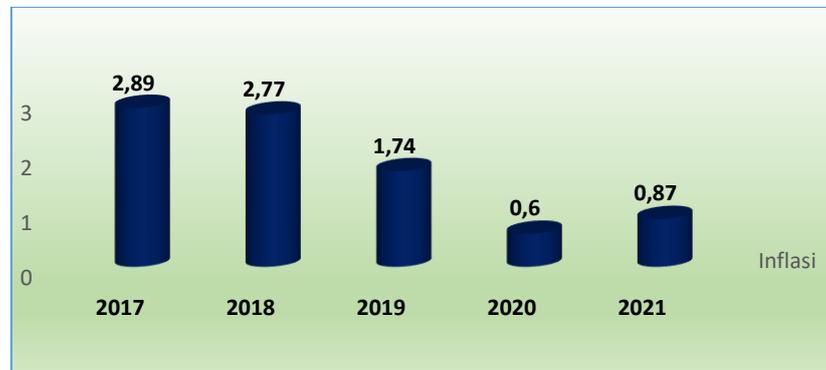
Dari Indikator Indeks Gini di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan telah mencapai target. Penurunan capaian Indeks Gini menunjukkan bahwa kesenjangan antar pendapatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek menurun dan terjadi peningkatan pemerataan ekonomi masyarakat yang mengindikasikan bahwa upaya pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang inklusif. Berdasarkan kategori, selama 3 (tiga) tahun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek masuk kategori sedang.

h. Inflasi

Inflasi merupakan angka (dalam satuan persen) yang menunjukkan kenaikan harga-harga barang atau jasa secara umum. Inflasi PDRB di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017-2021 memperlihatkan trend yang fluktuatif. Hal tersebut memberi arti bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi tidak sama tiap tahunnya, bisa lebih kecil ataupun lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sebaliknya.

Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun pada Tahun 2017 sebesar 2,89%, pada tahun 2018 turun sampai angka 2,77%, sedangkan tahun 2019 1,74%, dan tahun 2020 0,6%. Sedangkan tahun 2021 inflasi naik menjadi 0,87%. Berikut disajikan grafik perkembangan laju inflasi Kabupaten Trenggalek selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 :

Grafik
Laju Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2017–2021 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2022

i. Indeks Pembangunan Berkelanjutan

Indeks Pembangunan Berkelanjutan merefleksikan upaya untuk mewujudkan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya air dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Indeks pembangunan berkelanjutan bersama dengan Indeks Layanan Infrastruktur menjadi indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur. Indeks Pembangunan Berkelanjutan merupakan indikator baru yang isinya mengadopsi konsep Program Pengembangan Kota Hijau yang tersusun atas 8 (delapan) agregat/ komposit pembentuk yang meliputi Layanan Perencanaan berkelanjutan (*Green Planning and Design*), Layanan Transportasi Hijau (*Green Transportasi*), Layanan Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space*), Layanan Air Bersih yang Berkelanjutan (*Green*

Water), Layanan Energy yang Berkelanjutan (*Green Energy*), Layanan Bangunan yang berkelanjutan (*Green Buildings*), Layanan Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan (*Green Waste*), dan Layanan Komunitas Peduli Lingkungan (*Green Community*).

Capaian masing-masing layanan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Layanan Perencanaan berkelanjutan (*Green Planning and Design*) tercapai sebesar 30,08% dimana didalamnya merefleksikan nilai rata-rata ketersediaan dokumen perencanaan berkelanjutan dari aspek tata ruang, dokumen terkait kota hijau, dokumen pertanahan, dokumen infrastruktur dan kewilayahan, peraturan desa terkait lingkungan, serta perijinan bangunan gedung.
2. Layanan Transportasi Hijau (*Green Transportasi*) tercapai sebesar 37,20% yang merupakan nilai rata-rata dari ketersediaan prasarana perlengkapan jalan, mobility hub, jalan kabupaten dalam kondisi mantab dan berkeselamatan, jembatan yang berfungsi baik, akses antar kecamatan, simpul-simpul transportasi, dan pertumbuhan pelajar, difabel dan kelompok rentan lainnya yang terlayani angkutan umum.
3. Layanan Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space*) tercapai sebesar 83,66% yang merefleksikan nilai rata-rata dari unsur kualitas udara, tutupan lahan dan ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau.
4. Layanan Air Bersih yang Berkelanjutan (*Green Water*) tercapai sebesar 78,56% yang menggambarkan nilai rata-rata dari unsure gerakan konservasi sumber daya alam, kualitas air, kualitas jaringan irigasi dalam kondisi baik, desa pengelola SPAM dengan baik dan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum.
5. Layanan Energi yang Berkelanjutan (*Green Energy*) tercapai sebesar 21,07% yang menggambarkan nilai rata-rata dari unsur ketersediaan lampu penerangan jalan umum solar cell, pertumbuhan jumlah pemanfaat energy terbarukan dan elektrifikasi.
6. Layanan Bangunan yang berkelanjutan (*Green Buildings*) tercapai 47,51% yang menggambarkan nilai rata-rata dari unsur penyelenggaraan bangunan gedung Negara yang layak, penyusunan dan penetapan regulasi bangunan gedung, gedung Negara yang menerapkan prinsip hijau, ketersediaan rumah layak huni, sarana pelayanan pendidikan dasar sesuai standar dan sarana pelayanan kesehatan sesuai standar.
7. Layanan Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan (*Green Waste*) tercapai 64,13% yang menggambarkan nilai rata-rata dari unsur pengolahan sampah perkotaan, bank sampah yang ada dan penduduk yang terlayani sistem sanitasi.
8. Layanan Komunitas Peduli Lingkungan (*Green Community*) tercapai 59,14% yang menggambarkan nilai rata-rata dari unsur kegiatan dan

partisipasi masyarakat terkait kota hijau dan pohon yang didonasikan oleh masyarakat/komunitas/swasta.

j. Indeks Kota Hijau

Berdasarkan buku panduan penyelenggaraan program pengembangan kota hijau (P2KH) tahun 2017, kota hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya air dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kota hijau merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan, dimana konsep kota hijau ini memperhatikan manusia, lingkungan dan sarana prasarana terbangun. Indeks kota hijau Kabupaten Trenggalek dicapai melalui indikator indeks layanan infrastruktur, indeks pembangunan berkelanjutan, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dan indeks resiko bencana (IRB). Indeks Kota Hijau pada tahun 2020 sebesar 53,63%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 59,61% atau dengan capaian 101,87% dari target 58,51%.

e. Nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Masa Jabatan

Berikut nama dan periode masa jabatan bupati dan wakil bupati Kabupaten Trenggalek:

No	Nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Masa Jabatan
1.	Noto Sugito	1950
2.	R. Latif	1950
3.	Muprpto	1950 - 1958
4.	Abdul Karim Dipo Sastro	1958 - 1960
5.	Soetomo Boedi K.	1960 - 1965
6.	M. Hardjito	1965 - 1967
7.	Muladi	1967 - 1968
8.	Brigjen TNI (Purn.) Soetran	1968 - 1975
-	Moch. Poernanto	1975 - 1975
9.	Kolonel Inf (Purn.) Soedarso	1975 - 1985
10.	Haroen Al Rasyid	1985 - 1990
11.	Slamet	1990 - 1995
12.	Ernomo	1995 - 2000
13.	Mulyadi WR	2000 - 2005
14.	Soeharto Mahsun Ismail	2005 - 2010

No	Nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Masa Jabatan
15.	Mulyadi WR Kholiq	2010 - 2015
-	Djarianto	2016 - 2016
16.	Emil Dardak Mochamad Nur Arifin	2016 - 2019
17.	Mochamad Nur Arifin	2019 - 2021
18.	Mochamad Nur Arifin Syah Muhamad Natanegara	2021 - Sekarang

1.2 Permasalahan utama daerah

Beberapa permasalahan dan isu pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek antara lain:

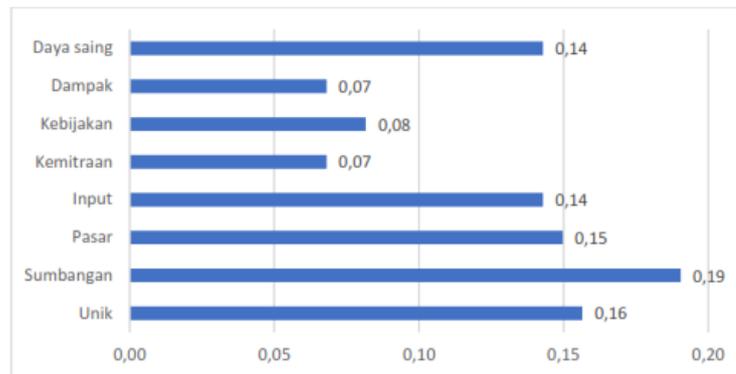
1. Kemiskinan, kesenjangan, kerentanan sosial dan ketimpangan gender;
2. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Belum optimalnya kualitas pembangunan, pemeliharaan dan layanan infrastruktur dasar;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur digital;
5. Degradasi lingkungan hidup dan belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
8. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintah desa;
9. Pengangguran, rendahnya daya saing tenaga kerja dan pendapatan per kapita;
10. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah.

2. Sumber Daya IPTEK yang Ada

2.1 Produk Unggulan Daerah

Produk unggulan daerah Kabupaten Trenggalek ditentukan berdasarkan beberapa kriteria antara lain daya saing, dampak terhadap lingkungan, kebijakan, kemitraan, input, pasar, sumbangan terhadap perekonomian daerah dan keunikan. Beberapa kriteria tersebut kemudian dianalisis menggunakan AHP untuk menentukan bobot. Adapun responden AHP diantaranya Dinas Perinaker, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas PMPTSP, Dinas Komidag, Bappedalitbang serta Trenggalek Creative Network.

Grafik
Bobot Kriteria Penentu Produk Unggulan Daerah



Sumber: Bappedalitbang, 2021

Berdasarkan bobot kriteria tersebut maka produk unggulan di Kabupaten Trenggalek yang memiliki kategori potensial tinggi diantaranya produk olahan hasil perikanan, pertanian, perkebunan dan holtikultura. Selain itu produk unggulan lainnya adalah hasil kriya seperti batik, anyaman bambu dan juga genteng.

Tabel
Komoditas Unggulan Pertanian di Kabupaten Trenggalek

No	Jenis	Komoditas
1.	Sayuran	Bayam, buncis, jamur, kacang panjang, kangkung, labu siam, jengkol, dan petai
2.	Buah-buahan	Alpukat, durian, manggis, salak dan melon
3.	Biofarmaka	Kapulaga, laos, lempuyang, dan temulawak
4.	Perkebunan	Kelapa dan kakao
5.	Peternakan	Sapi, kerbau, kambing dan domba
6.	Perikanan	Tongkol, cakalang, nila, lele dan udang

Sumber : Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2020

2.2. SDM IPTEK di daerah

Dengan beralihnya pejabat struktural eselon IV menjadi tenaga fungsional, maka terjadi penambahan tenaga fungsional yang cukup besar. SDM IPTEK di daerah diantaranya peneliti, perekayasa, perencana, analis kebijakan dan dosen perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan maka peneliti menjadi tenaga IPTEK yang sangat krusial. Namun sampai dengan saat ini, Kabupaten Trenggalek tidak memiliki satupun peneliti.

Tabel
SDM IPTEK Kabupaten Trenggalek

No	SDM IPTEK	Jumlah
1.	Peneliti	-
2.	Perekayasa	-
3.	Perencana	46
4.	Analis kebijakan	35

No	SDM IPTEK	Jumlah
5.	Dosen	136

Sumber: BKD Kab. Trenggalek, 2022; BPS Kab. Trenggalek, 2022

2.3. Kelembagaan IPTEK di daerah

Kabupaten Trenggalek memiliki perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan yaitu Bappedalitbang. Selain itu terdapat juga beberapa perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Polkesma, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB).

Tabel
Perguruan Tinggi di Kabupaten Trenggalek

No	Perguruan Tinggi	Alamat
1.	Institut Teknologi dan Bisnis (ITB)	Jalan Soekarno Hatta Kelutan Trenggalek
2.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri	Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17 B Trenggalek
3.	Polkesma	Jl. Dr. Soetomo No. 5 Trenggalek
4.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah	Kecamatan Panggul
5.	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP)	Jl. Supriadi, Nggempleng, Ngares, Kec. Trenggalek

Sumber: PPDIKTI Kemendikbud, 2022

2.4. Infrastruktur Riset dan Inovasi

Saat ini Kabupaten Trenggalek mengembangkan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan *Science Techno Park* Atsiri pada kawasan Dilem Wilis yang terletak di Kecamatan Bendungan yang menggunakan konsep edu-ekowisata. Pengembangan TTP bekerjasama dengan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur dan STP bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang.

3. Kapasitas fiskal dan kemandirian fiskal

Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Sedangkan kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Perkembangan indeks kapasitas dan kemandirian fiskal Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel
Perkembangan IFKD Kabupaten Trenggalek

No	Tahun	IKFD	Kategori
1.	2017	1,01	Sedang
2.	2018	0,978	Sedang
3.	2019	1,047	Sedang
4	2020	0,785	Sedang

No	Tahun	IKFD	Kategori
5.	2021	0.943	Sedang

Sumber: Kemenkeu 2017-2021

Indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Trenggalek dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif. IKFD terbesar terjadi tahun 2019 sebesar 1,047 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,785. Kategori selama 5 tahun terakhir yaitu sedang. Hampir sama dengan IKFD, indeks kemandirian fiskal Kabupaten Trenggalek juga fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan naik. Kenaikan tersebut belum berarti karena selama 5 tahun terakhir Kabupaten Trenggalek masih termasuk daerah yang belum mandiri. Daerah dikatakan menuju kemandirian fiskal jika indeksnya 0,25-0,5; mandiri jika 0,5 – 0,75; dan sangat mandiri jika >0,75.

Tabel
Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Trenggalek

No	Tahun	IKFD	Kategori
1.	2016	0,1116	Belum mandiri
2.	2017	0,1098	Belum mandiri
3.	2018	0,1282	Belum mandiri
4	2019	0,1432	Belum mandiri
5.	2020	0,1406	Belum mandiri

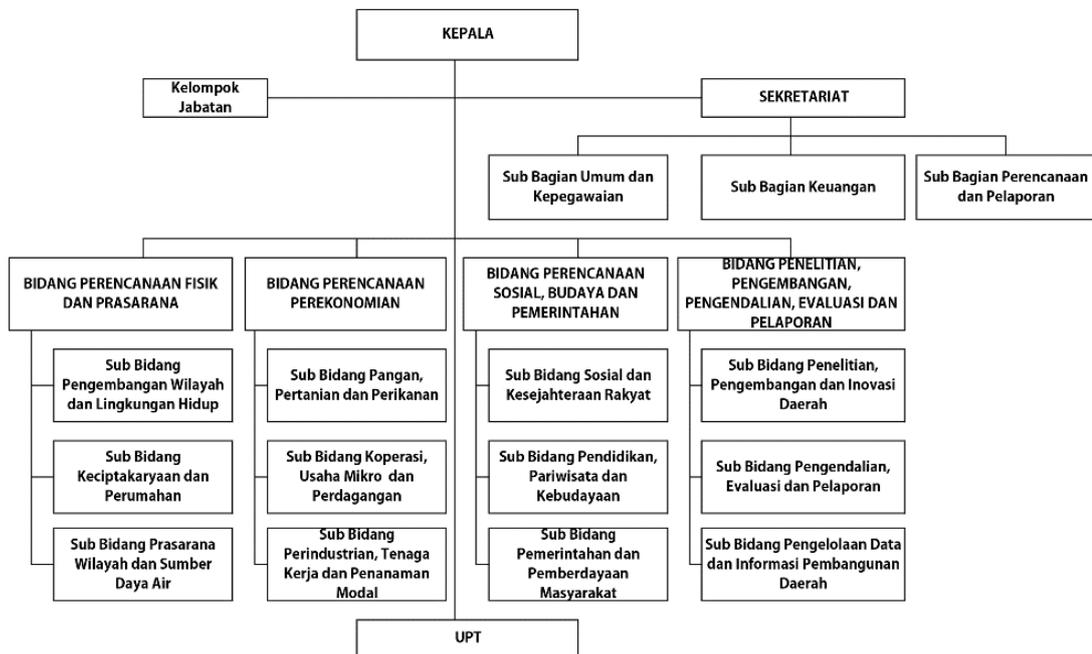
Sumber: BPK, 2021

4. Kelembagaan penelitian dan pengembangan yang ada saat ini

Kelembagaan penelitian dan pengembangan yang ada saat ini sesuai dengan Peraturan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Tipe A) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut :

Gambar
Bagan Organisasi Kelembagaan Bappedalitbang



Sumber: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2017

Kelembagaan penelitian dan pengembangan berada pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan tugas pokok dan fungsinya, dalam penelitian dan kelembagaan dibantu oleh Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai tugas:

- menyusun rencana kegiatan Sub Bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
- menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
- menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Sub Bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
- melakukan pengumpulan, analisa, evaluasi dan verifikasi data sebagai bahan penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
- menyiapkan rancangan pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;

- f. melakukan pengendalian terhadap implementasi penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
- g. melakukan pengumpulan data, analisa dan verifikasi usulan penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah pada proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD) beserta perubahannya pada Sub Bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
- h. melakukan pengumpulan, analisa dan verifikasi data laporan serta evaluasi capaian target pelaksanaan program kegiatan pada Bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah sebagai bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati;
- i. melakukan fasilitasi penyusunan dokumen penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah pada perangkat Daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Pengalaman dalam pelaksanaan program inovasi/penelitian dan pengembangan

5.1. Sistem Inovasi Daerah Sesuai Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri

Sejak tahun 2017, Kabupaten Trenggalek telah melakukan penguatan sistem inovasi daerah melalui pengembangan pilar-pilar inovasi daerah seperti pengembangan SDM, pembentukan ekosistem inovasi, perluasan pasar, penguatan faktor pendukung (enabling environment) serta peningkatan kesejahteraan. Dalam upaya penguatan tersebut, Bupati Trenggalek membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Pada saat tahun itu juga tim koordinasi menyusun dokumen roadmap Sistem Inovasi Daerah 2017-2021. Adapun fokus penguatan sistem inovasi daerah yang tertuang dalam roadmap tersebut antara lain:



Sumber: Bappedalitbang, 2017

Selain bertugas menyusun roadmap, Tim Koordinasi juga menjamin program dan kegiatan yang ada di roadmap masuk ke dalam dokumen rencana pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Output dari pelaksanaan roadmap diantaranya terbangunnya lembaga inkubator bisnis berupa taman teknologi pertanian yang terletak di Kecamatan Bendungan. Selain itu, dari segi pengembangan kewirausahaan telah terdapat beberapa embrio pusat inovasi seperti Galeri Djoeng, Rumah Kreatif, Smart Center dan Galeri Gemilang.

Gambar
Taman Teknologi Pertanian



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2022

Seiring berjalannya waktu dokumen tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan penguatan inovasi di Kabupaten Trenggalek.

Gambar
SK Tim Koordinasi SIDA tahun 2017 dan Dokumen Hasil Evaluasi Roadmap

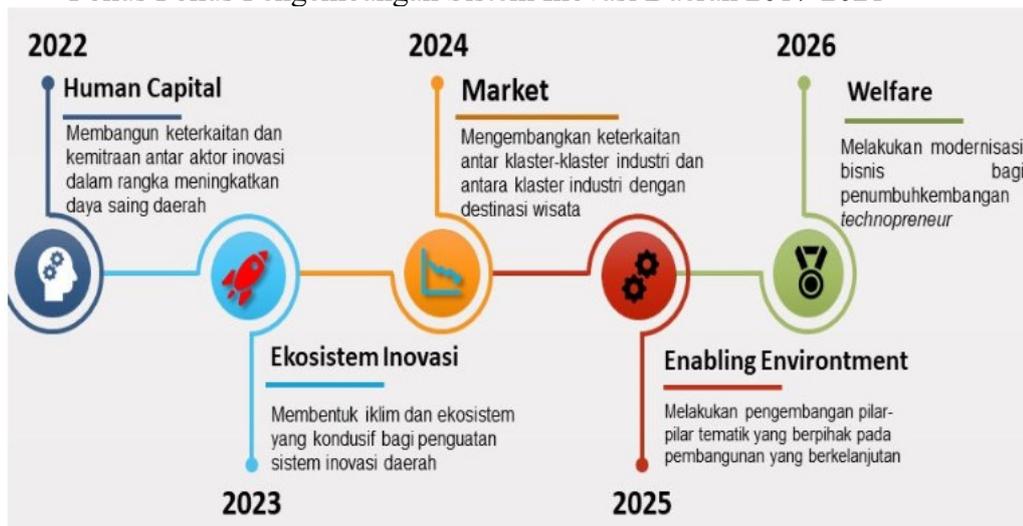


Sumber: Bappedalitbang, 2020

Hasil dari evaluasi tersebut dijadikan dasar penyusunan roadmap periode berikutnya yaitu periode 2021-2026 dan akan dijadikan saran masukan bagi penyusunan

dokumen RPJMD. Agar dapat terimplementasi dengan baik, fokus pengembangan sistem inovasi daerah kemudian disinkronkan dengan visi misi Bupati Trenggalek. Inovasi dan kreatifitas dari sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas yang dikembangkan. Tim koordinasi-pun segera dibentuk untuk mengawal proses tersebut. Sampai dengan saat ini (oktober 2022), roadmap sistem inovasi daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 masih dalam proses pembahasan raperbup. Adapun fokus pengembangan sistem inovasi daerah yang tertuang dalam roadmap tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar
Fokus Fokus Pengembangan Sistem Inovasi Daerah 2017-2021



Sumber: Bappedalitbang, 2021

Adapun dokumen roadmap sistem inovasi daerah 2021-2026 beserta Tim Koordinasi yang dibentuk dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

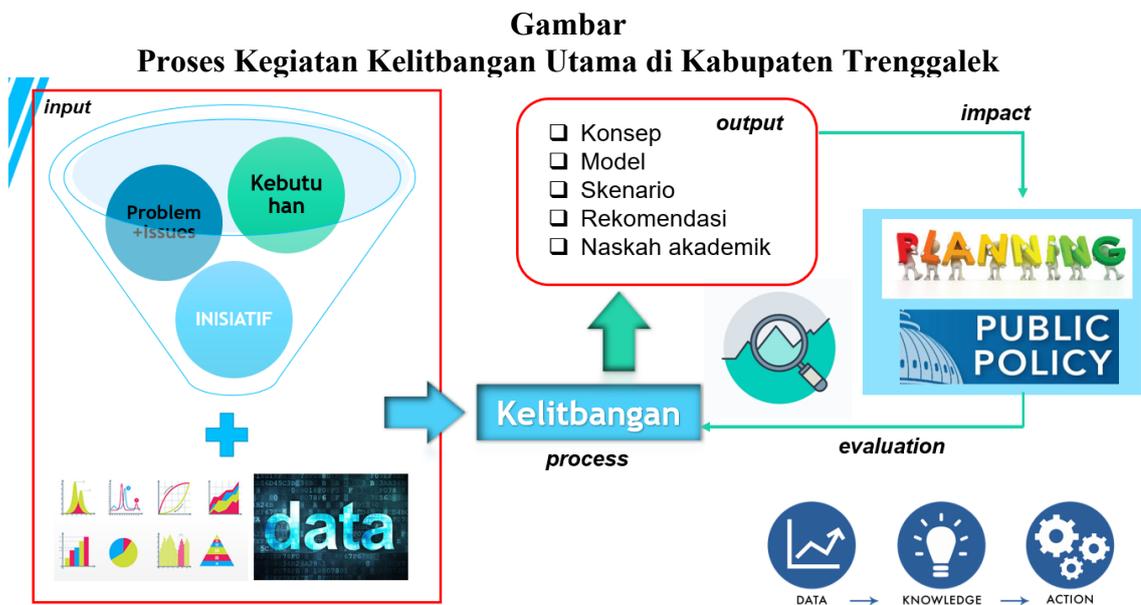
Gambar
Roadmap SIDA dan Tim Koordinasi yang menyusunnya



Sumber: Bappedalitbang, 2022

5.2. Kelitbangan Pemerintah Daerah sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016

Sejak tahun 2017, Kabupaten Trenggalek melalui Bappedalitbang melakukan kegiatan kelitbangan baik kelitbangan utama maupun kelitbangan pendukung. Kelitbangan utama yang dilakukan oleh Bappedalitbang adalah penelitian, pengembangan, dan evaluasi kebijakan. Kelitbangan utama yang dilakukan sampai dengan saat ini digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, inovasi daerah dan perencanaan pembangunan. Berikut ini alur kegiatan kelitbangan utama yang sudah dilakukan.



Sumber: Bappedalitbang, 2022

Kegiatan tersebut menghasilkan berbagai dokumen riset setiap tahunnya. Berikut ini adalah contoh hasil riset beserta pemanfaatannya yang dihasilkan Bappedalitbang selama tahun 2020-2021.

Tabel
Pemanfaatan Hasil Riset

No	Judul Riset	Tahun	PEMANFAATAN INOVASI	OPD Pemanfaat
1.	Penyusunan Pemetaan Komoditas Ekspor-Impor Melalui Pelabuhan Prigi	2019	Pengembangan Prigi Front Beach City	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Perikanan 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.	Kajian Sosial Budaya Masyarakat Pesisir dalam Mendukung Program Pembangunan	2019		
3.	Studi Kelayakan Pembangunan Terminal Tipe B di Kecamatan Watulimo	2020		
4.	Studi Bioekonomi pada Perikanan Benih Bening Lobster di Kabupaten Trenggalek	2020	Lelang Ikan Online (Lion)	Dinas Perikanan

No	Judul Riset	Tahun	PEMANFAATAN INOVASI	OPD Pemanfaat
5.	Studi Kelayakan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Trenggalek	2020	100 desa wisata terintegrasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6.	<i>Scenario Planning</i> Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Trenggalek	2019		
7.	Studi Kelayakan Jalan Akses Durio Forestry	2020		
8.	Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Bendungan	2019	Trenggalek Atsiri App	Dinas Pertanian dan Pangan
9.	Kajian Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Trenggalek	2019	Segitiga Pertumbuhan Wilayah Plus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	Kajian Penataan Kawasan Jalan Brigjen Soetran Kabupaten Trenggalek	2019	Trenggalek Creative City	Bappedalitbang
11.	Kajian Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten Trenggalek	2019, 2020	1. GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2. Super Keren/Sepeda Keren	
			3. IPUSTAGA 4. CILEN (Cerita Online)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			5. Gelas Mempesona Hati 6. Kenek Beraksi	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Feasibility Study (FS) Pembangunan Shelter PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Trenggalek	2020	Kampung Inklusi Gunung Kebo	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Strategi Operasional Promotif-Preventif Pandemi Covid-19	2020	Check Point di 3 titik pintu keluar masuk kabupaten	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengembangan asrama Covid	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Kartu Penyangga Ekonomi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			BLT kepada masyarakat Trenggalek untuk menunda mudik	Dinas Sosial, Pemberdayaan

No	Judul Riset	Tahun	PEMANFAATAN INOVASI	OPD Pemanfaat
				Perempuan dan Perlindungan Anak
14.	Kajian Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19	2020	Inovasi tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 sektor restoran	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Inovasi tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 sektor perhotelan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Inovasi tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 sektor destinasi wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Inovasi tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 sektor pelayanan publik (perijinan)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: Bappedalitbang, 2021

Dalam upaya memenuhi amanat Permendagri Nomor 16 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga menyusun dokumen rencana induk kelitbang tahun 2018-2022.

Gambar
Rencana Induk Kelitbang

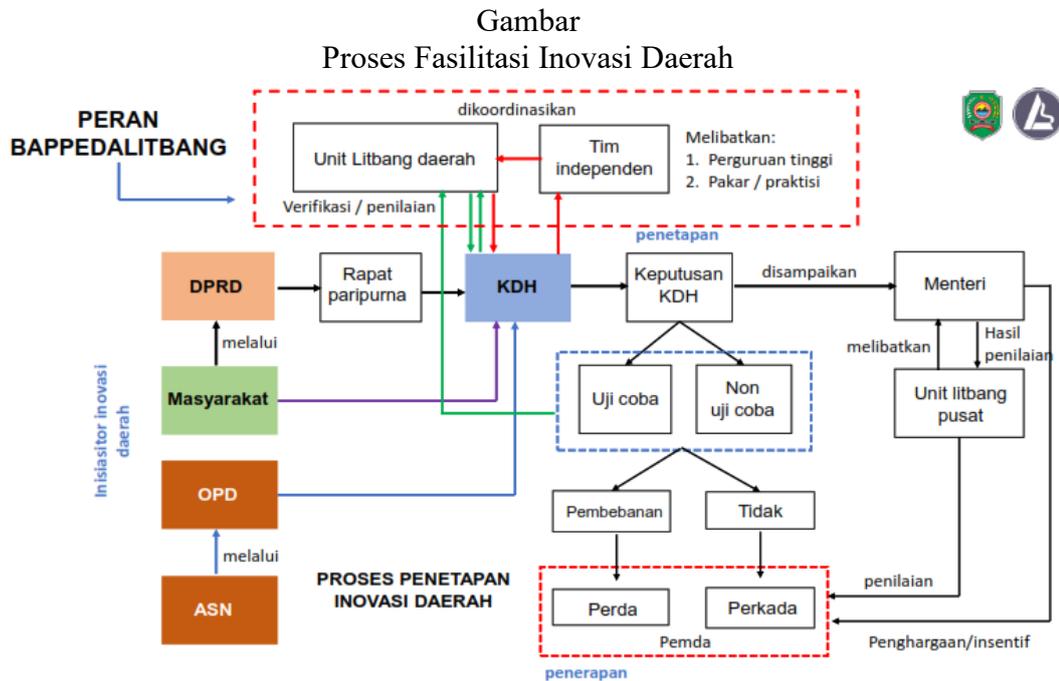


Sumber: Bappedalitbang, 2022

5.3. Inovasi Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, melalui Bappedalitbang juga melakukan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah. Bappedalitbang sebagai unit litbang Kabupaten Trenggalek melakukan proses verifikasi dan penilaian terhadap inovasi daerah baik yang diusulkan oleh ASN, OPD, anggota DPRD dan kepala daerah. Kegiatan yang dilakukan selama ini setelah dilakukan penilaian dan verifikasi, inovasi-inovasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui ajang penghargaan

Innovative Government Award (IGA) / indeks inovasi daerah. Berikut ini alur/proses fasilitasi inovasi daerah yang dilakukan oleh Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek.



Sumber: Bappedalitbang, 2022

Kabupaten Trenggalek melaporkan inovasi daerahnya ke Kemendagri sejak tahun 2018. Pada tahun 2018, nilai indeks inovasi daerah sebesar 2.980 (kategori sangat inovatif) dan masuk peringkat ke 22 dari seluruh kabupaten se-Indonesia. Pada tahun 2019, nilai indeks inovasi daerah sebesar 5.320 (kategori sangat inovatif) dan masuk peringkat ke 52 dari seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Dan pada tahun 2020, nilai indeks inovasi daerah sebesar 3.342 (kategori sangat inovatif) dan masuk peringkat 47. Pada tahun 2021, skor indeks inovasi Kabupaten Trenggalek sebesar 55,28 (skala 0-100) dengan kategori inovatif dan menempati peringkat ke 49 dari 415 kabupaten se-Indonesia.

Tabel
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek

Tahun	Jumlah inovasi	Indeks	Kategori	Peringkat
2018	3	2.980	Sangat inovatif	22
2019	8	5.320	Sangat inovatif	52
2020	32	3.342	Sangat inovatif	47
2021	30	55,28	Inovatif	49

Sumber: Kemendagri, 2021

Gambar
Penghargaan IGA 2020



Sumber: Bagian Humas Setda Kabupaten Trenggalek 2021

Pada tahun 2020, Kabupaten Trenggalek juga meraih penghargaan dalam keikutsertaan Lomba Inovasi Tatanan Normal Baru yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Kemendagri melombakan 7 sektor dan 4 klaster. Sektor tersebut antara lain pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi umum, tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sedangkan klasternya meliputi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan kabupaten/ daerah tertinggal.

Prestasi yang diukir Pemkab Trenggalek dalam perlombaan ini antara lain Juara I sektor restoran aman covid-19 dengan judul Rumah Makan Produktif Higienis, Juara I sektor hotel aman Covid-19 dengan judul video BEST Hotel Jaas , Juara I sektor pelayanan terpadu satu pintu aman Covid-19 dengan judul video Macoin Aja PTSP dan Juara III sektor tempat wisata aman Covid-19 dengan judul video *On Demand CHS Tourism* Desa Wisata Durensari.

Gambar
Penghargaan Lomba Inovasi Tatanan Normal Baru



Sumber: internet

Melalui prestasi pembuatan video adaptasi kebiasaan baru tersebut, pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 10 milyar.

Dana tersebut tentunya digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang memang membutuhkan biaya yang sangat besar.

Kemampuan daerah untuk berinovasi secara langsung mempengaruhi tingkat daya saing. Indeks daya saing daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar 3,158 (rentang nilai 0-5) atau predikat daya saing tinggi dengan rincian penilaian: a) Ekosistem inovasi sebesar 3,591; b) Aspek penguat sebesar 3,123; c) Sumber daya manusia sebesar 2,688; dan Pasar sebesar 3,229. Kabupaten Trenggalek mengikuti pemetaan indeks daya saing daerah sejak tahun 2019. Pada tahun 2019, nilai IDSD sebesar 2,91 (kategori tinggi). Pada tahun 2020, nilai IDSD sebesar 3,27 (kategori tinggi) dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3,15 (kategori tinggi). Indeks daya saing daerah terdiri dari 12 pilar, 23 dimensi dan 88 indikator.

5.4. Kegiatan/Kajian Riset dan Inovasi

Mengingat pentingnya paradigma *science based policy*, maka riset merupakan hulu sebuah kebijakan dan perencanaan pembangunan. Riset yang dilakukan Bappedalitbang berusaha menjawab isu-isu permasalahan aktual. Berikut ini riset yang dilakukan oleh Bappedalitbang sejak tahun 2019.

Tabel
Judul Riset oleh Bappedalitbang

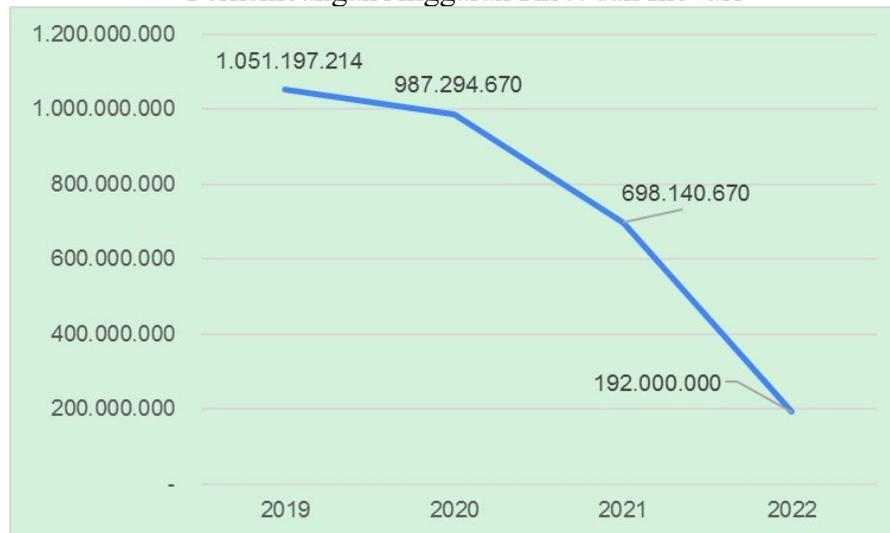
NO	JUDUL RISET	TAHUN
1	Roadmap Pasar Daerah	2019
2	Kajian Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten Trenggalek	2019
3	Kajian Pemanfaatan Kawasan Jalan Brigjen Soetran Kabupaten Trenggalek TA. 2019	2019
4	Kajian Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Program Pembangunan	2019
5	Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Bendungan	2019
6	Kajian Konsep Pengembangan Wilayah Desa Wisata Kabupaten Trenggalek	2019
7	Scenario Planning Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Trenggalek	2019
8	Background Study Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Perencanaan Perekonomian Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026	2020
9	Penyusunan Pemetaan Komoditas Ekspor-Impor Melalui Pelabuhan Prigi	2020
10	Kajian Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten Trenggalek	2020
11	Feasibility Study (FS) Pembangunan Shelter PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Trenggalek	2020
12	Feasibility Study (FS) RSUD Watulimo	2020
13	Feasibility Study (FS) Sport Center Watulimo	2020

NO	JUDUL RISET	TAHUN
14	Studi Kelayakan Pembangunan Terminal Tipe B di Kecamatan Watulimo	2020
15	Studi Kelayakan Jalan Akses Durio Forestry	2020
16	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Kawasan Wisata Segitiga Tapan-Kerjo-Tumpuk	2020
17	Penyusunan Dokumen FS Pembangunan Jalan Karangturi-Salamwates	2020
18	Studi Bioekonomi pada Perikanan Benih Bening Lobster di Kabupaten Trenggalek	2020
19	Kajian Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Trenggalek	2020
20	Strategi Operasional Promotif-Preventif Pandemi Covid-19 di Kabupaten Trenggalek	2020
21	Studi Kelayakan Pengembangan Desa Wisata di Selingkar Wilis Kabupaten Trenggalek	2020
22	Reviu Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023	2021
23	Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Munjungan	2021
24	Kajian Pengukuran Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Trenggalek	2021
25	Penyusunan Dokumen Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek	2021
26	Penyusunan Dokumen Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek	2021
27	Studi Kelayakan Pengembangan Panggul Little Jogja : Perspektif Spasial, Ekonomi dan Sosial Budaya Historis	2021
28	Prediksi Dampak Pengembangan Rumah Sakit Terhadap Aspek Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Kesehatan	2021
29	Perempuan, Kemiskinan dan Pariwisata	2021
30	Penyusunan Dokumen Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek	2022
31	Pemeliharaan dan Pembaruan Sistem Informasi Tujuan Pengembangan Berkelanjutan Kabupaten Trenggalek	2022
32	Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Durenan	2022
33	Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Dongko Culture Heritage	2022

5.5. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan sejak tahun 2019. Namun penurunan tersebut tidak mengurangi kualitas riset yang dilakukan. Adapun perkembangan anggaran riset di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar
Perkembangan Anggaran Riset dan Inovasi



Sumber: Bappedalitbang, 2022

6. Keberadaan forum pelaku inovasi daerah

Kabupaten Trenggalek memiliki forum pelaku inovasi daerah yang sebagian besar masih terdiri dari perangkat daerah. Forum tersebut terwadahi ke dalam SK Tim Koordinasi Penguatan sistem inovasi daerah dan tim kelitbangan yang dibentuk sejak tahun 2017. Berikut SK forum pelaku inovasi daerah yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Tabel
Surat Keputusan Tim Koordinasi SIDA

No	JUDUL SK	No SK	Tahun SK
1.	Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	188.45/189/406.001.3/2022	2022
2.	Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	188.45/153/406.001.3/2021	2021
3.	Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	188.45/478/406.001.3/2020	2020
4.	Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	188.45/272/406.001.3/2019	2019
5.	Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	188.45/276/35.03.001.3/2018	2018
6.	Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	188.45/520/35.03.001.3/2017	2017

Sumber: Bappedalitbang, 2022

Tabel
Surat Keputusan Tim Kelitbang

No	JUDUL	No SK	Tahun SK
1	Keputusan Bupati Trenggalek tentang Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu Dan Tim Kelitbang Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Daerah	188.45/273/406.001.3/2019	2019
2	Keputusan Bupati Trenggalek tentang Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu Dan Tim Kelitbang Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Daerah	188.45/654/35.03.001.3/2018	2018
3	Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Pengendali Mutu Kajian atau Tim Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Daerah	188.45/610/35.003.001.3/2017	2017

Sumber: Bappedalitbang, 2022

7. Peraturan perundangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi daerah yang diterbitkan

Sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

8. Kerjasama yang telah/sedang dilaksanakan dalam rangka riset dan inovasi

Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dilakukan dengan beberapa metode seperti swakelola maupun kerjasama baik dengan konsultan dan perguruan tinggi. Beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi yang masih berlaku dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel
Kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

No	Perguruan Tinggi
1	Universitas Gadjah Mada
2	Universitas Brawijaya
3	Universitas Sebelas Maret
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan
5	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6	Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya
7	Universitas Negeri Malang
8	Universitas Airlangga Surabaya

Sumber: Sekretariat Daerah, 2022

9. Rencana kelembagaan BRIDA yang akan dibentuk

Berdasarkan isu dan permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Trenggalek dan keterbatasan SDM di Kabupaten Trenggalek maka pembentukan BRIDA di Kabupaten Trenggalek direncanakan melakat dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan.

Pembentukan BRIDA diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan, maka kelembagaan yang dibentuk akan dinamakan Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Adapun rencana struktur organisasi kelembagaannya sebagai berikut:

Gambar
Rencana Struktur Organisasi Bapperida



BRIDA melekat pada Organisasi Bappeda dengan membentuk bidang baru, yaitu Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Jumlah maksimal bidang yang ada saat ini adalah 4 bidang. Mengingat urgensi bidang-bidang tersebut dan pekerjaan yang harus dilaksanakan juga banyak maka keempat bidang dipertahankan kemudian ditambah 1 bidang baru yaitu bidang riset dan inovasi.

10. Posisi Pembentukan BRIDA dalam Propemperda

Sampai dengan saat ini belum ada rencana pembentukan BRIDA yang masuk ke dalam propemperda.

PENUTUP

Demikian proposal pembentukan BRIDA Kabupaten Trenggalek ini kami ajukan untuk mendapat Pertimbangan Pembentukan BRIDA dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

KONTAK PERSON LENGKAP:

Nama : Harendhika Lukiswara
 Jabatan : Penata Tk.I
 Alamat lengkap : Kantor BAPPEDA Kab. Trenggalek Jln. KH. Wachid Hasyim No. 5 Ngantru Trenggalek, Jawa Timur 66311
 No telpon Instansi : 0355791121
 No telp Seluler : 081230567634